



DATA PERSPEKTIF GENDER DAN KESEJAHTERAAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2019



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya sehingga Tim Penulis telah dapat menyelesaikan buku “ Profil Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2017”, Salawat dan salam di mohonkan kepada Allah SWT agar dilimpahkan kepada Nabi Muhannag SAW.

Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketersediaan data capaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak. Disamping itu juga menyediakan hasil analisis isu-isu prioritas diberbagai bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan perlindungan anak, bahan masukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif akan hak perempuan dan anak di Kota Pariaman.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tim penulis yang telah bekerjasama dalam melaksanakan penulisan buku ini.
2. Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dari SKPD Kota Pariaman yang telah memberikan berbagai sumbangan pemikiran, saran dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan buku ini.
3. Bapak-bapak, dan ibu peserta Sosialisasi Analisis Gender dan KPA yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berguna.

Semoga semua sumbangan moril dan materil yang diberikan, menjadi amal shaleh dan mendapat imbalan berlipat ganda dari Allah SWT dalam rangka peningkatan harkat dan martabat manusia, meskipun segenap upaya telah dilakukan untuk kesempurnaan kajian ini, namun kami menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan kajian ini.

Padang, September 2018

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan KB Kota Pariaman

-----oo0oo-----

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang pemikiran | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH KOTA PARIAMAN | 4 |
| BAB III KEPENDUDUKAN | 10 |
| A. Penduduk Kota Pariaman | 10 |
| B. Penduduk Golongan Muda | 13 |
| C. Penduduk Dewasa (19-59 Tahun) | 13 |
| D. Penduduk Lansia (> 60 Tahun) | 14 |
| BAB IV RUMAH TANGGA | 15 |
| A. Kepala Rumah Tangga | 15 |
| B. Kepala Rumah Tangga Miskin | 17 |
| BAB V BIDANG PENDIDIKAN | 19 |
| A. Angka Melek Huruf | 20 |
| B. Angka Partisipasi Sekolah | 21 |
| C. Angka Partisipasi Murni | 25 |
| D. Angka Partisipasi Kasar | 27 |
| E. Angka Putus Sekolah | 27 |
| F. Keadaan Pendidikan | 32 |
| G. Tingkat Sekolah Dasar (SD) | 33 |
| H. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 35 |
| I. Tingkat Sekolah Menengah (SM) | 36 |

| | |
|---|----|
| BAB VI BIDANG KESEHATAN | 39 |
| A. Angka Kematian Bayi (AKB) | 39 |
| B. Angka Kematian Ibu (AKI) | 40 |
| C. Keluarga Berencana (KB) | 43 |
| BAB VII BIDANG KETENAGAKERJAAN | 46 |
| A. Tenaga Kerja Migran | 46 |
| B. Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) | 54 |
| BAB VIII PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK | 49 |
| A. Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif | 49 |
| B. Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Eksekutif | 52 |
| BAB IX KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 54 |
| A. Anak Penyandang Cacat | 54 |
| B. Anak Terlantar | 58 |
| C. Pekerja Anak | 59 |
| BAB X PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran dan Rekomendasi | 62 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|---|---------|
| Tabel 2.1 | Luas Wilayah Kota Pariaman..... | 6 |
| Tabel 3.1 | Jumlah Penduduk Kota Pariaman menurut Jenis Kelamin | 11 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Penduduk Kota Pariaman menurut golongan umur dan jenis kelamin | 12 |
| Tabel 4.1 | Kepala Rumah Tangga Miskin di Kota Pariaman..... | 18 |
| Tabel 5.1 | Persentase Angka Partisipasi Murni..... | 24 |
| Tabel 5.2 | Persentase Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin..... | 25 |
| Tabel 5.3 | Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA Negeri dan Swasta di Kota Pariaman | 30 |
| Tabel 5.4 | Jumlah Satuan Pendidikan di Kota Pariaman | 32 |
| Tabel 5.5 | Data Pokok SD dan MI Tahun Pelajaran 2011/2012 | 34 |
| Tabel 5.6 | Data Pokok SMP dan MTs | 35 |
| Tabel 5.7 | Data Pokok SMA, MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011/2012 | 37 |
| Tabel 5.8 | Indikator Pemerataan dan Perluasan Pendidikan | 37 |
| Tabel 6.1 | Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2012... | 42 |
| Tabel 6.2 | Ibu hamil yang mendapat Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan Tablet Zat Besi (fe) di Kota Pariaman | 43 |
| Tabel 6.3 | Peserta Wanita Akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kota Pariaman Tahun 2012 | 45 |
| Tabel 6.4 | Peserta Laki-laki Akseptor Keluarga Berencana (KB) di Kota Pariaman Tahun 2012 | 45 |
| Tabel 7.1 | Tenaga Kerja Migran Antar Kerja Antar Negara (AKAN) | 47 |
| Tabel 7.2 | Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Menurut Jenis Usaha dan Jenis Kelamin | 48 |
| Tabel 8.1 | Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif di Kota Pariaman | 50 |
| Tabel 8.2 | Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2012 | 53 |
| Tabel 9.1 | Anak Penyandang Cacat di Kota Pariaman Tahun 2012 | 56 |
| Tabel 9.2 | Perkembangan Pendidikan Khusus di Kota Pariaman | 57 |

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 9.3 | Anak Terlantar di Kota Pariaman Tahun 2012..... | 59 |
| Tabel 9.4 | Jumlah Pekerja Anak (Berumur 10-17 Tahun) dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2012 | 60 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Gambar 3.1 Piramid Penduduk Kota Pariaman..... | 12 |
| Gambar 3.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Anak, Dewasa dan Lansia..... | 13 |
| Gambar 4.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga | 17 |
| Gambar 5.1 Persentase Melek Huruf Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman | 20 |
| Gambar 5.2 Persentase Jumlah Penduduk usia 7-12 Tahun yang bersekolah di Kota Pariaman..... | 22 |
| Gambar 5.3 Persentase Jumlah Penduduk usia 13-15 Tahun yang bersekolah | 23 |
| Gambar 5.4 Persentase Jumlah Penduduk usia 16-18 Tahun yang bersekolah di Kota Pariaman | 24 |
| Gambar 5.5 Persentase APK pada tingkat SD/MI/Paket A menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman | 27 |
| Gambar 6.1 Grafik AKB Kota Pariaman berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2012 | 39 |
| Gambar 6.2 Jumlah Kelahiran di Kota Pariaman dan Penolong Persalinan Tahun 2012 | 41 |
| Gambar 6.3 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Saran Kesehatan Tahun 2012 | 42 |
| Gambar 6.4 Akseptor KB Wanita dan Pilihan Alat KB yang digunakan | 44 |
| Gambar 6.5 Akseptor KB Laki-Laki dan Pilihan Alat KB yang digunakan | 44 |
| Gambar 8.1 Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Kota Pariaman | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Pembangunan yang dilakukan di Kota Pariaman dalam setiap sektor kehidupan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan keadilan kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Namun disadari bahwa hasil pembangunan itu belum dapat dinikmati oleh perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan tidak optimal terakomodir oleh perencanaan dan pembuatan keputusan pembangunan yang pada umumnya laki-laki. Sebagai contoh, kondisi ini dapat dilihat dari 20 (dua puluh) orang anggota DPRD Kota Pariaman hanya 1 (satu) orang anggota DPRD yang perempuan dan yang lainnya adalah laki-laki. Padahal lebih 51 % penduduk Kota Pariaman adalah perempuan.

Kondisi di atas mengindikasikan masih adanya ketidakadilan gender dalam kehidupan berkeluarga bermasyarakat di Kota Pariaman. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan

perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. PUG ditujukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam upaya menegakan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu perlu dibentuk mekanisme untuk memformulasi kebijakan dan program yang responsive gender, yaitu program yang mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan dengan ketersediaan data terpilah, sehingga intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

B. Tujuan

Berdasarkan latar belakang pemikiran itu, maka penyusunan buku ini bertujuan untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki-laki yang terkait dengan masalah kependudukan, kerumahtanggaan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perempuan disektor publik dan kekerasan terhadap perempuan. Data tentang

anak terkait dengan hak anak seperti pendidikan, kesehatan dan dilengkapi dengan anak terlantar dan penyandang cacat.

BAB II
GAMBARAN UMUM
WILAYAH KOTA PARIAMAN

Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang terbentuk dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Secara geografis Kota Pariaman terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Pada sisi Utara, Selatan dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan sisi sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Secara astronomis Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar $73,36 \text{ km}^2$, dengan panjang garis pantai $12,00 \text{ km}^2$. Luas daratan kota ini setara dengan 0,17 persen dari luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau kecil yakni Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Anso Duo dan Pulau Kasiak.

Letak geografis Kota Pariaman merupakan perlintasan antara beberapa kota di Sumatera Barat khususnya dan regional umumnya, yang sangat strategis untuk wilayah pesisir Barat Sumatera

Kota Pariaman juga memiliki kawasan pesisir yang terbentang dengan potensi perikanan dan pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan berkembangnya

kegiatan perdagangan dan pariwisata, maka posisi Kota Pariaman sebagai pusat perdagangan hasil pertanian dan pariwisata pantai, akan menjadi semakin penting.

Jumlah penduduk Kota Pariaman pada tahun 2018 tercatat sebanyak 92.758 jiwa, yang terdiri dari 46.929 jiwa laki-laki dan 45.829 jiwa perempuan. Dengan komposisi seperti ini berarti *sex ratio* untuk Kota Pariaman pada tahun 2018 adalah sebesar 102,40 persen.

Dengan wilayah seluas 73,36 km², kepadatan penduduk Kota Pariaman pada tahun 2018 adalah sebanyak 92.758 jiwa per km² dimana Kecamatan Pariaman Tengah adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni sebanyak 31.613 jiwa per km².

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Pariaman

| No | Kecamatan | Rata-rata Tinggi dari Permukaan Laut (mdpl) | Luas Wilayah (Ha) | % Terhadap Luas Kota Pariaman |
|----|------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Pariaman Selatan | 0-10 | 1682,00 | 22,93 |
| 2 | Pariaman Tengah | 0-10 | 1568,13 | 21,37 |
| 3 | Pariaman Timur | 5-15 | 1750,87 | 23,87 |
| 4 | Pariaman Utara | 0-15 | 2335,00 | 31,83 |

Sumber : Pariaman Dalam Angka 2019

Secara administratif, wilayah Kota Pariaman berbatas sebelah utara dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah barat dengan Samudera Indonesia/Laut Hindia dan sebelah Timur dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan adanya pemekaran, awal tahun 2010 yang lalu maka Kota Pariaman menjadi 4 (empat) Kecamatan dengan 71 (tujuh puluh satu) Desa/Kelurahan.

Adapun Kecamatan serta Desa/Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Pariaman Utara.

Terdiri dari :

16 (enam belas) Desa yaitu Desa Padang Birik-Birik, Desa Sintuk, Desa Balai Naras, Desa Naras I, Desa Naras Hilir, Desa Manggung, Desa Apar, Desa Ampalu, Desa Tanjung Sabar, Desa Cubadak Air, Desa Cubadak Air Utara, Desa Cubadak Air Selatan, Desa Tungkal Utara, Desa Tungkal Selatan, Desa Sikapak Timur, Desa Sikapak Barat.

2. Kecamatan Pariaman Tengah

Terdiri dari :

22 (dua puluh dua) Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Karan Aur, Kelurahan Lohong, Kelurahan Pasir, Kelurahan Kampung Perak, Kelurahan Pondok Duo, Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Kampung Jawa I, Kelurahan Kampung Jawa II, Kelurahan Alai Gelombang, Kelurahan Taratak, Kelurahan Jalan Kereta Api, Kelurahan Ujung Batung, Kelurahan Jalan Baru, Kelurahan Jati Hilir, Desa Rawang, Desa Pauh Barat, Desa Pauh Timur, Desa Kampung Baru, Desa Jati Mudik, Desa Cimparuh.

3. Kecamatan Pariaman Selatan

Terdiri dari :

17 (tujuh belas) Desa yaitu Desa Toboh Palabah, Desa Simpang, Desa Rambai, Desa Punggung Lading, Desa Pauh Kurai Taji, Desa Balai Kurai Taji, Desa Batang Tajongkek, Desa Palak Aneh, Desa Marabau, Desa Marunggi, Desa Kampung Apar, Desa Sungai Kasai, Desa Taluk, Desa Pasir Sunur, Desa Sikabu, Desa Padang Cakur.

4. Kecamatan Pariaman Timur

Terdiri dari :

16 (enam belas) Desa yaitu Desa Talago Sarik, Desa Kampung Gadang, Desa Kampung Baru Padusunan, Desa Pakasai, Desa Koto Marapak, Desa Batang Kabung, Desa Bato, Desa Sungai Sirah, Desa Sungai Pasak, Desa Cubadak Mentawai, Desa Air Santok, Desa Kajai, Desa Kampung Tengah, Desa Bungo Tanjung, Desa Kampung Kandang, Desa Kaluat.

Sebagian besar wilayah Kota Pariaman merupakan asal masyarakat Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kehidupan sosial masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi oleh filsafat yang mengungkapkan pandangan hidup masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan adagium "Adat diisi limbago dituang". Adagium ini mengandung arti bahwa norma adat ditetapkan, baik secara mufakat maupun dari kebiasaan yang telah terfermentasi. Norma-norma tersebut kemudian diramu kembali dengan melihat

kondisi alam dan lingkungan, seperti ungkapan "Alam takambang jadi guru" Istilah ini merupakan manifestasi dari ayat Kauniah dari Allah SWT agar manusia dapat menggunakan karakteristik alam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dari perkembangan tersebut lahirlah filsafat adat orang Minangkabau yang dikenal dengan "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Dari filsafat adat tersebut terlihat jelas bahwa kebudayaan orang Minangkabau sangat dipengaruhi oleh integritas adat dan agama Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan bila mayoritas masyarakat Minangkabau adalah masyarakat Islam yang fanatik.

Jumlah penduduk Kota Pariaman (2018) sebesar 92.758 terdiri dari suku Minangkabau juga terdapat suku Batak dan Jawa disamping itu suku lain yang berdomisili di Kota Pariaman cukup beragam di karenakan tugas maupun telah memilih daerah ini sebagai tempat untuk kehidupannya.

BAB III

KEPENDUDUKAN

A. Penduduk Kota Pariaman

Penduduk merupakan faktor penentu pembangunan, karena dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan penduduk tidak hanya berperan sebagai pelaku pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus dimonitor setiap saat, karena pengelolaan penduduk perlu diarahkan pada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas penduduk. Oleh karena itu komposisi penduduk yang menggambarkan karakteristik penduduk harus dijadikan pertimbangan agar kondisi penduduk di Kota Pariaman dapat menunjang pembangunan. Hal ini dipandang sangat penting karena perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia sangat berkaitan dengan data dan informasi kependudukan tersebut.

Infomasi yang diperoleh dari data terpilah menurut jenis kelamin akan memberikan gambaran yang jelas mengenai seberapa besar jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Ada sisi lain, informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan gambaran tentang beberapa jumlah penduduk yang termasuk dalam penduduk muda atau penduduk lanjut usia.

Tabel 3.1 berikut akan memberikan informasi dan gambaran jumlah penduduk di 4 (Empat) kecamatan di Kota Pariaman menurut jenis kelamin.

**Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kota Pariaman
Menurut Jenis Kelamin 2018**

| Kecamatan | Jenis Kelamin | | | Rasio Jenis Kelamin |
|------------------|---------------|-----------|--------|---------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |
| Pariaman Selatan | 9.920 | 9.660 | 19.580 | 102,69 |
| Pariaman Tengah | 16.051 | 15.562 | 31.613 | 103,14 |
| Pariaman Timur | 9.275 | 9.187 | 18.462 | 100,69 |
| Pariaman Utara | 11.683 | 11.420 | 23.103 | 102,30 |

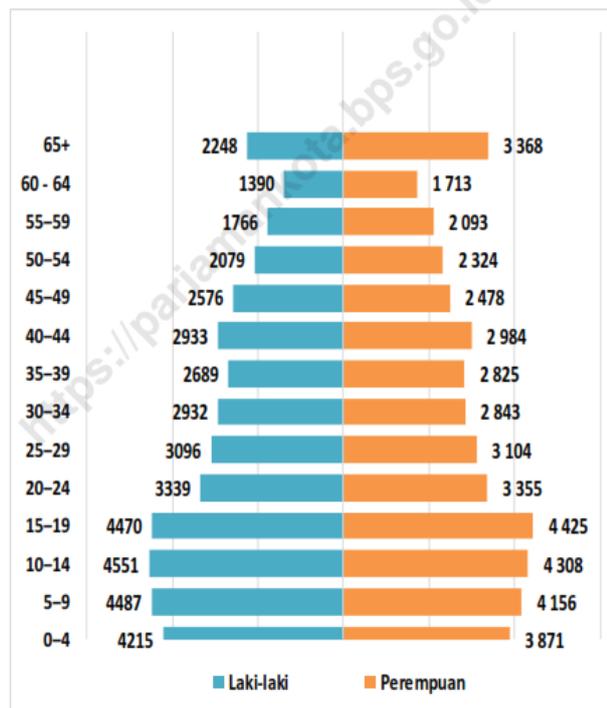
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Pariaman adalah 92.758 orang, yang terdiri dari 46.929 orang penduduk laki-laki dan 45.829 orang penduduk perempuan. Data ini secara umum menunjukkan bahwa di Kota Pariaman jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Dengan seks rasio 102,40. Hal ini arti bahwa dalam setiap 100 orang penduduk laki-laki terdapat 98 orang penduduk perempuan.

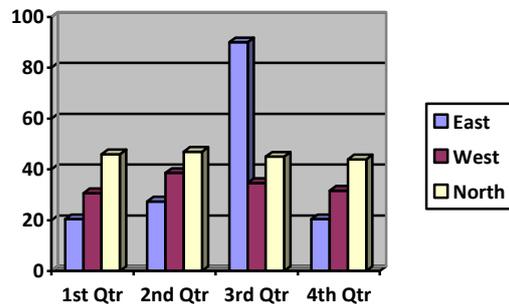
**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Pariaman
menurut golongan umur dan jenis kelamin**

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | |
|---------------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 0-4 | 3.474 | 3.143 | 6.617 |
| 5-9 | 4.222 | 3.990 | 8.212 |
| 10-14 | 4.472 | 3.838 | 8.310 |
| 15-19 | 4.756 | 4.374 | 9.130 |
| 20-24 | 4.677 | 4.327 | 9.004 |
| 25-29 | 3.806 | 3.387 | 7.193 |
| 30-34 | 3.811 | 3.446 | 7.257 |
| 35-39 | 3.530 | 3.155 | 6.685 |
| 40-44 | 3.078 | 2.943 | 6.021 |
| 45-49 | 2.585 | 2.723 | 5.308 |
| 50-54 | 2.486 | 2.562 | 5.048 |
| 55-59 | 2.022 | 2.181 | 4.203 |
| 60 - 64 | 1.597 | 1.918 | 3.515 |
| 65 - 69 | 1.015 | 1.297 | 2.312 |
| 70 - 74 | 564 | 897 | 1.461 |
| 75+ | 834 | 1.648 | 2.482 |

Sementara itu informasi mengenai jumlah penduduk Kota Pariaman berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat dari tabel 3.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa komposisi penduduk Kota Pariaman berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin yang dapat dipahami dari gambar bentuk piramida penduduk (gambar 3.1) yang menunjukkan bahwa jumlah terbesar dari penduduk laki-laki dan perempuan berada pada kelompok umur 0 – 19 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran pada periode nol yang lalu cukup tinggi, sehingga rentang jumlah penduduk pada usia muda pada piramida penduduk Kota Pariaman terlihat lebih besar dari jumlah yang penduduk di atasnya.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kota Pariaman Tahun 2018





B. Penduduk Golongan Muda

Penduduk golongan muda atau sering juga disebut sebagai anak dimana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 adalah penduduk yang berusia antara usia 0 s/d 18 tahun. Di Kota Pariaman Jumlah Penduduk golongan muda mencapai 25.588 orang yang terdiri dari 12.335 (48,21%) perempuan dan 13.253 (51,79%) laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk golongan muda laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk golongan muda perempuan, dengan seks rasio 107. Artinya setiap 100 orang penduduk golongan muda perempuan terdapat 107 orang penduduk golongan muda laki-laki.

Disamping itu, data itu juga menunjukkan bahwa 29,54 % dari jumlah penduduk Kota Pariaman adalah penduduk golongan muda atau berada pada usia anak, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Anak, Dewasa dan Lansia

| Kecamatan | Dewasa | | | Anak-Anak | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| Pariaman Selatan | 6.209 | 6.732 | 12.941 | 2.943 | 2.726 | 5.669 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Pariaman Tengah | 10.834 | 11.118 | 21.952 | 4.461 | 4.215 | 8.676 |
| Pariaman Timur | 5.306 | 5.708 | 11.014 | 2.376 | 2.206 | 4.582 |
| Pariaman Utara | 7.169 | 7.954 | 15.123 | 3.473 | 3.188 | 6.661 |

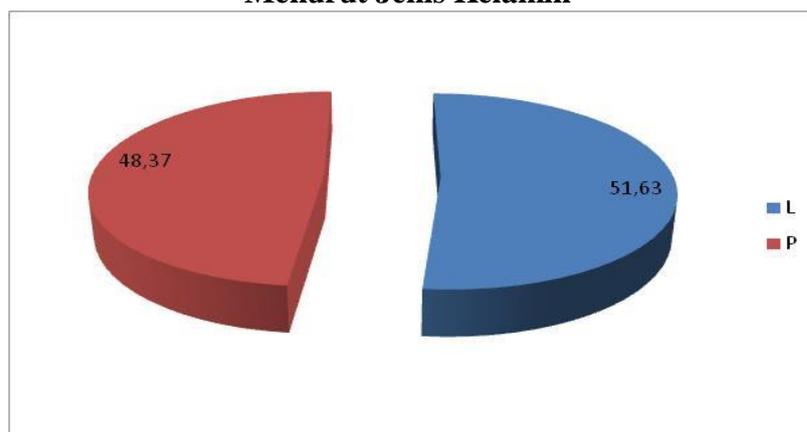
Sumber : Pariaman Dalam Angka 2018

C. Penduduk Dewasa (19-59 Tahun)

Penduduk golongan dewasa adalah penduduk yang berumur 19 tahun sampai dengan 59 tahun, yang sering disebut sebagai penduduk produktif. Di Kota Pariaman penduduk produktif ini berjumlah sebanyak 61.030 orang, atau 70,46 % dari seluruh penduduk Kota Pariaman.

Penduduk dewasa atau penduduk produktif ini terdiri dari 31.512 orang perempuan (51,63%) dan 29.518 orang laki-laki (48,37%). Data ini juga menunjukkan bahwa penduduk dewasa perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

Gambar 3.2. Komposisi Penduduk Usia Dewasa Menurut Jenis Kelamin

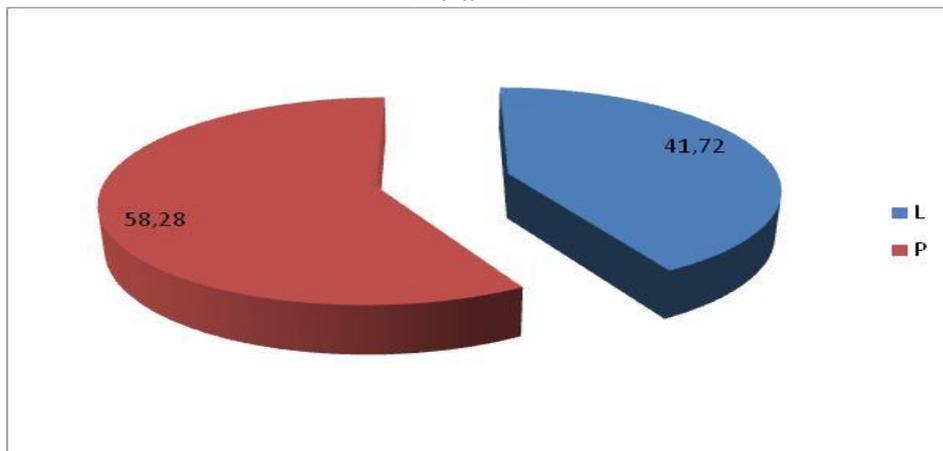


D. Penduduk Lansia (> 60 tahun)

Penduduk lansia merupakan singkatan dari penduduk lanjut usia, yakni penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. Penduduk golongan umur ini jumlahnya tidak lagi sebanyak golongan usia di bawahnya. Penduduk lansia

ini di Kota Pariaman berjumlah sebanyak 8.719 orang, atau 10,06 % dari jumlah penduduk Kota Pariaman. Jumlah penduduk lansia itu terdiri dari 5.061 orang perempuan dan 3.638 orang laki-laki. Data ini memperlihatkan bahwa jumlah perempuan lansia lebih banyak dari pada jumlah laki-laki lansia. Hal ini membuktikan bahwa angka harapan hidup lansia perempuan lebih tinggi dari angka harapan hidup lansia laki-laki.

Gambar 3.3. Komposisi Penduduk Usia Lanjut Menurut Jenis Kelamin



BAB IV

RUMAH TANGGA

Definisi rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan kebutuhan sehari-hari menjadi satu. Definisi rumah tangga berbeda dengan definisi keluarga, dimana dalam masyarakat umum keluarga identik dengan kartu keluarga dan dalam satu keluarga biasanya terdiri dari bapak, ibu dan anak. Sementara dalam satu rumah tangga bisa terdiri dari lebih dari satu keluarga, yang memiliki satu kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota rumah tangganya, dan kepala rumah tangga bisa dipegang oleh bapak atau ibu, atau anak yang telah bekerja dan menafkahi rumah tangga tersebut.

A. Kepala Rumah Tangga

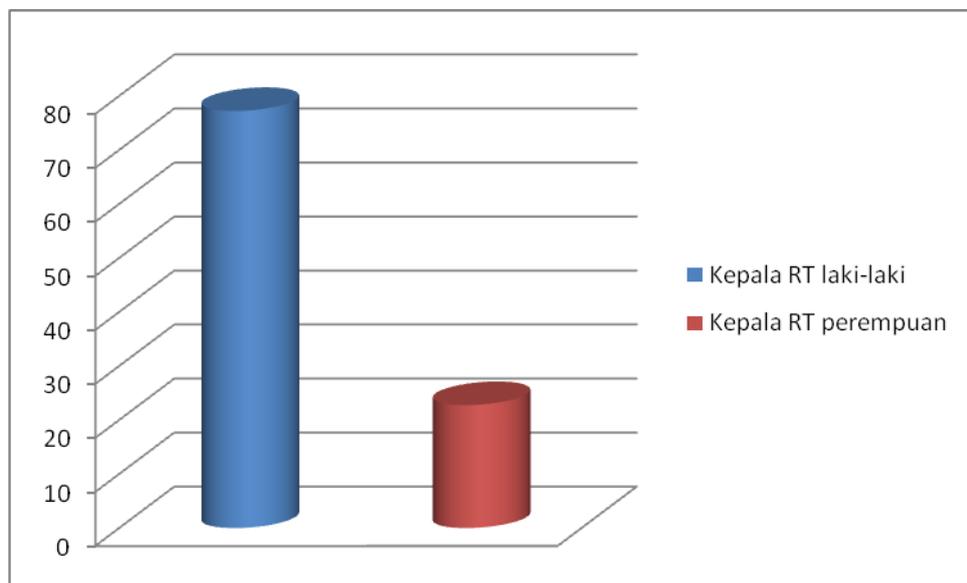
Definisi kepala rumah tangga adalah seseorang/penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya. Sebagaimana di sebutkan di atas, bahwa ada juga kepala rumah tangga yang dipegang oleh perempuan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, jumlah rumah tangga di Kota Pariaman tahun 2018 adalah sebanyak 23.865, dengan komposisi kepala rumah tangga laki-laki di Kota Pariaman adalah 79,13 % sementara kepala rumah tangga perempuan hanya

20,87 %. Jika dirinci, persentase kepala rumah tangga laki-laki lebih tinggi dibanding kepala rumah tangga perempuan.

Gambar 4.1

Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga



B. Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Pendidikan kepala rumah tangga di Kota Pariaman jika dilihat menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan untuk semua jenis jenjang pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin

| Pendidikan Kepala RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| Tdk Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD | 6.602 | 6.172 | 12.774 |
| SD dan Sederajat | 6.882 | 7.342 | 14.224 |
| SMP dan Sederajat | 7.441 | 6.398 | 13.839 |
| SMA ke atas | 12.006 | 10.726 | 22.732 |

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2018

C. Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga akan sangat menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga itu sendiri. Hubungan kesejahteraan rumah tangga umumnya berkorelasi negatif dengan banyaknya jumlah anggota rumah tangga. Jika semakin banyak anggota rumah tangga maka akan semakin turun tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Tabel 4.2 Jumlah anggota rumah tangga menurut jenis kelamin kepala rumah tangga

| Jumlah Anggota RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 36,36 | 63,64 | 100 |
| 2-3 | 75,17 | 24,83 | 100 |
| >4 | 86,65 | 13,35 | 100 |

Sumber : Disdukcapil Kota Pariaman, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa kepala rumah tangga yang berjenis kelamin laki-laki pada umumnya memiliki anggota rumah tangga yang lebih besar dari 1 dan kepala rumah tangga yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak memiliki anggota rumah tangga sebanyak 1 orang.

BAB V

BIDANG PENDIDIKAN

Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sektor pendidikan harus menjadi perhatian penting, baik oleh Pemerintah maupun oleh anggota masyarakat. Indikator pendidikan antara lain kemampuan membaca dan menulis, partisipasi sekolah, angka putus sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia. Semakin baik kualitas pendidikan akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat.

Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, baik normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Pembangunan oleh sumber daya manusia yang berkualitas tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga, peran perempuan dalam menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan penting sebagai ibu. Ibu yang berkualitas diharapkan akan membentuk anak-anak yang lebih berkualitas.

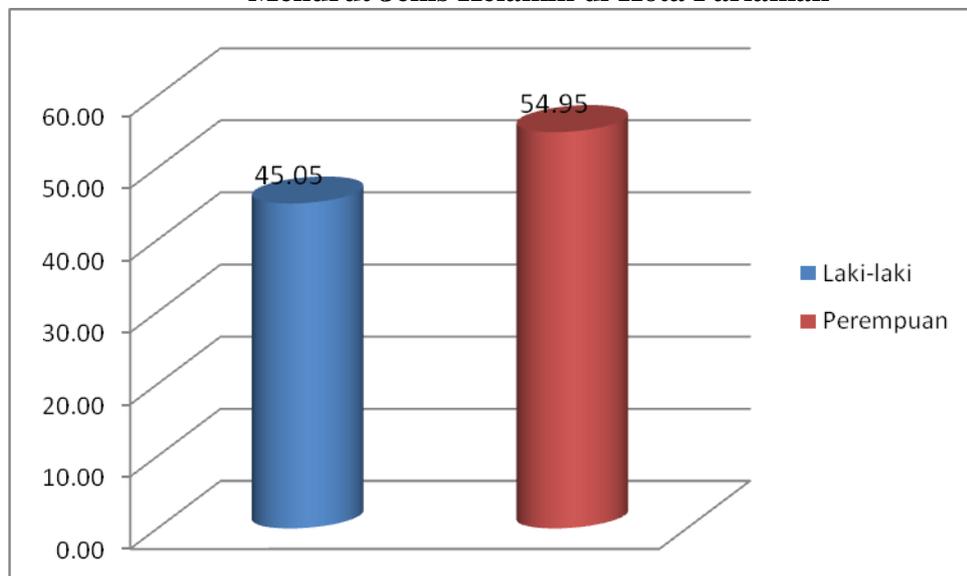
Pada bagian ini akan diulas seberapa jauh pendidikan telah diakses oleh perempuan dan termasuk didalamnya anak berkebutuhan khusus.

A. Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan kemampuan

membaca dan menulis akan banyak kesempatan untuk memperkaya informasi dan pengetahuan, yang pada akhirnya akan menambah kemampuan dan keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tingkat kemampuan membaca dan menulis penduduk dapat dilihat berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH).

Gambar 5.1
Persentase Melek Huruf Berumur 10 tahun ke Atas
Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman



Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa AMH Kota Pariaman untuk laki-laki adalah 45,05 %, dan untuk perempuan adalah 54,95 %. Angka persentase ini cukup signifikan dan lebih tinggi dibanding rata-rata pencapaian AMH Nasional. Persentase penduduk yang melek huruf perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, walaupun perbedaannya tidak begitu signifikan.

Masih rendahnya Angka Melek Huruf laki-laki memperlihatkan bahwa masih perlu ditingkatkan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk

pemberantasan buta huruf pada kelompok laki-laki. Semakin tinggi Angka Melek Huruf perempuan, berarti akan semakin meningkat dan terbukanya peluang bagi perempuan untuk memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan jumlah perempuan yang berkualitas.

Berbagai program telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan penduduk yang buta huruf, antara lain dengan mengadakan program Perpustakaan Keliling, mendirikan Taman Bacaan dan program pemberantasan Buta Aksara.

B. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) biasanya diterapkan untuk kelompok umur sekolah mulai jenjang pendidikan pra sekolah (5-6 tahun), SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi akan menunjukkan keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan.

Di Kota Pariaman APS untuk kelompok umur 5-6 tahun menunjukkan angka yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 20,77 % untuk laki-laki dan 34,58 % untuk perempuan. Pada jenjang pendidikan SD (usia 7 – 12 tahun) menunjukkan angka 100 % untuk semua jenis kelamin. Angka ini memperlihatkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk usia 7 – 12 tahun, kelompok penduduk perempuan telah mendapatkan akses yang sama untuk mengenyam pendidikan.

Pada jenjang pendidikan SMP (usia 13-15 tahun), APS untuk jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 99,83 & berbanding 94,27 %, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA juga memperlihatkan hal yang sama yaitu perempuan sebesar 92,75 % dan laki-laki 87,08 %. Fenomena di atas memberikan fakta bahwa kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Kota Pariaman sudah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 5.1 Angka Partisipasi Pendidikan Formal Menurut Usia dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman

| Karakteristik | 5-6 | 7-12 | 13-15 | 16-18 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Jenis Kelamin | | | | |
| Laki-laki | 20,77 | 100,00 | 94,27 | 87,08 |
| Perempuan | 34,58 | 100,00 | 99,83 | 92,75 |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Pariaman

C. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka ini dapat digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Angka ini dilihat melalui tingkat pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B

untuk tingkat pendidikan dasar, serta SMA/MA/Paket C untuk tingkat pendidikan lanjutan atas.

Tabel. 5.2 Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin

| Karakteristik | SD | SMP | SMA |
|----------------------|--------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jenis Kelamin | | | |
| Laki-laki | 100,00 | 70,81 | 64,11 |
| Perempuan | 100,00 | 73,80 | 79,00 |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Pariaman

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni Kelompok perempuan dan laki-laki pada tingkatan pendidikan SD/MI sudah mencapai angka 100 %. Pada tingkatan pendidikan SLTP dan SLTA menunjukkan bahwa APS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini berarti bahwa tidak ada halangan yang terjadi bagi anak perempuan untuk melanjutkan Pendidikan di Kota Pariaman.

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan yang sesuai. Persentase APK ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan dalam memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 5.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menuut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman

| Karakteristik | SD | SMP | SMA |
|----------------------|--------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jenis Kelamin | | | |
| Laki-laki | 113,15 | 91,52 | 88,43 |
| Perempuan | 109,50 | 79,41 | 105,44 |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Kota Pariaman

Pada jenjang SD dan SMA, Angka Partisipasi Kasar di Kota Pariaman menunjukkan bahwa untuk penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan untuk jenjang Pendidikan SMP lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini bias terjadi karena setelah tamat SMP, anak laki-laki sudah ada yang langsung terjun ke dalam lapangan kerja unuk membantu orang tua mencari nafkah.

E. Angka Putus Sekolah

Pemerintah Republik Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu mendeklarasikan wajib belajar 9 tahun demikian juga Kota Pariaman sebagai bagian integral dari NKRI. Hal ini mengandung arti bahwa setiap anak usia 6-15 tahun harus dapat menyelesaikan pendidikannya minimal sampai SLTP. Sesuai dengan komitmen dalam bidang pendidikan Kota Pariaman telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun, hal ini didasari atas meningkatnya angka rata-rata lama sekolah ditahun 2008 adalah 9,33 tahun meningkat di tahun 2012 menjadi 10,21 tahun.

Bila diamati lebih dalam dari perspektif gender jumlah anak putus sekolah pada pendidikan SD, SLTP dan SLTA di Kota Pariaman lebih banyak dialami oleh anak laki-laki daripada anak perempuan. Pada hal Pemerintah Kota Pariaman telah memberi akses, partisipasi yang sama kepada setiap anak usia sekolah untuk mendapat pelayanan pendidikan. Diperkirakan faktor sosial budaya dan ekonomi merupakan penyebab besarnya jumlah putus sekolah laki-laki dan perempuan pada setiap jenjang pendidikan dan pada setiap Kecamatan yang ada di Kota Pariaman.

Tabel 5.3 Jumlah Siswa Putus Sekolah SMA Negeri dan Swasta Di Kota Pariaman

| No | Kecamatan | SD | | | SLTP | | | SLTA | | |
|----|------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | Pariaman Utara | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pariaman Tengah | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pariaman Timur | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pariaman Selatan | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah | 13 | 5 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |

Menganalisa lebih dalam tentang jumlah siswa putus sekolah di Kota Pariaman sebagaimana terdapat pada tabel di atas, maka terlihat bahwa pada setiap Kecamatan di Kota Pariaman terdapat anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SLTP dengan jumlah yang bervariasi. Meskipun Pemerintah RI telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun dan telah mencanangkan berbagai upaya untuk peningkatan partisipasi siswa untuk mendapat pendidikan yang

layak, ternyata di lapangan masih ditemukan adanya siswa-siswa yang putus sekolah.

Suatu hal yang menarik dari perspektif gender adalah siswa putus sekolah laki-laki lebih banyak dari siswa perempuan di Kota Pariaman, kondisi ini merupakan hal yang tak terduga karena kebijakan dalam bidang pendidikan sudah menyatakan memberikan akses, peran, kontrol dan manfaat yang sama bagi bagi setiap anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dan dari sisi budaya selama ini umumnya dipahami bahwa peluang putus sekolah bagi siswa perempuan lebih besar dari pada laki-laki.

Untuk mengantisipasi kemungkinan putus sekolah, Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga telah membuat berbagai macam kebijakan antara lain sekolah gratis untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP negeri, pemberian bea siswa terhadap siswa dari keluarga kurang mampu, program Bina Keluarga Remaja (BKR sebagai salah satu program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk membantu/membina para orang tua yang mempunyai anak remaja).

Adapun beberapa faktor penyebab jumlah siswa laki-laki putus sekolah lebih banyak dari pada siswa perempuan sebagai berikut ;

1. Faktor ekonomi keluarga, kebiasaan keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah menyuruh atau melibatkan anak laki-laki untuk bekerja dalam rangka menambah pendapatan keluarga sebagai tukang ojek, kondektur, nelayan keasyikan mencari uang, terutama untuk lama kelamaan menjadi kebutuhan sendiri, antara lain membeli rokok dan lain

sebagainya. Hal ini menyebabkan kegiatan sekolah anak terabaikan dan lama kelamaan anak merasa malas sekolah, dan akhirnya putus sekolah. Kondisi ini juga didukung oleh pemahaman/pendapat orang tua dan masyarakat bahwa tujuan akhir sekolah adalah untuk mencari uang/nafkah, dan tanpa tamat sekolah pun saat ini anak laki-laki mereka telah mampu mendapatkan uang. Akhirnya mereka berfikir bahwa apa yang mereka lakukan merupakan jalan pintas untuk mendewasakan anak laki-laki.

2. Faktor geografis, dimana jarak antara rumah tempat tinggal dengan sekolah yang cukup jauh, disamping kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung, menyebabkan anak sering terlambat, sehingga suka bolos dan malas masuk sekolah dan akhirnya menjadi putus sekolah. Hal ini terjadi, terutama pada daerah yang luas, dimana tempat tinggal penduduk tersebar pada berbagai pelosok, seperti di Kecamatan Pariaman Utara.
3. Suasana sekolah yang tidak nyaman dan memberikan motivasi yang efektif kepada siswa yang mempunyai potensi untuk putus sekolah, sehingga siswa terdorong untuk meninggalkan bangku sekolah. Banyak kasus anak laki-laki putus sekolah yang disebabkan perlakuan guru terhadap siswa yang kurang baik, seperti menegur atau memberikan hukuman yang tidak mendidik terhadap siswa yang nakal, suka bolos, tidak membuat tugas dan lain-lain, menyebabkan akhirnya siswa putus sekolah.

4. Orang tua, banyak orang tua yang tidak menyadari pentingnya pendidikan bagi kehidupan masa depan anak laki-laknya, dan tidak memberikan motivasi yang optimal bagi kelanjutan sekolah putra mereka sehingga anak putus sekolah.
5. Faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau, yang memberikan kebebasan pada anak laki-laki untuk melakukan apa yang diinginkan, sehingga anak laki-laki mempunyai keberanian dan kontrol lebih kuat terhadap dirinya untuk menentukan apa yang diinginkannya, dibandingkan dengan anak perempuan.
6. Pengaruh lingkungan pergaulan, Ada juga siswa laki-laki yang putus sekolah karena ikut-ikutan dengan teman yang telah lebih dahulu putus sekolah. Apa lagi melihat teman yang putus sekolah ikut dalam suatu pekerjaan yang menghasilkan uang maka ia akan ikut dengan teman tersebut, sehingga melupakan pentingnya sekolah.

Memahami faktor penyebab siswa laki-laki lebih banyak putus sekolah dari pada siswa perempuan maka dirasa perlu reformulasi kebijakan pendidikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pada masa yang akan datang sehingga dapat menurunkan jumlah anak putus sekolah terutama siswa laki-laki, pada setiap jenjang pendidikan.

F. Keadaan Pendidikan

Keadaan pendidikan di Kota Pariaman dapat di lihat dari jumlah satuan pendidikan seperti table 5.4 di bawah ini.

Tabel 5.4
Jumlah Satuan Pendidikan
Di Kota Pariaman

| No | Satuan Pendidikan | Status | Jumlah |
|----|-------------------|--------|--------|
| 1 | PAUD | SWASTA | 90 |
| 2 | TK | NEGERI | 1 |
| | | SWASTA | 30 |
| 3 | SD | NEGERI | 72 |
| | | SWASTA | 3 |
| 4 | MI | NEGERI | 2 |
| | | SWASTA | 2 |
| 5 | SDLB | NEGERI | 2 |
| | | SWASTA | 2 |
| 6 | SMP | NEGERI | 9 |
| | | SWASTA | 2 |
| 7 | MTs | NEGERI | 3 |
| | | SWASTA | 4 |
| 8 | SMA | NEGERI | 6 |
| | | SWASTA | 1 |
| 9 | MA | NEGERI | 1 |
| | | SWASTA | 2 |
| 10 | SMK | NEGERI | 4 |
| | | SWASTA | 5 |

Sumber data : Profil Pendidikan Kota Pariaman

G. Tingkat Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data pada Tahun Pelajaran 2017/2018, jumlah siswa SD sebanyak 10.875 siswa. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas, dengan rincian ruang kelas dalam kondisi baik berjumlah 311, ruang kelas kondisi rusak ringan berjumlah 80 dan 57 ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan jumlah kelas yang ada sebanyak 455 kelas termasuk didalamnya ruang kelas bukan milik sebanyak 7 ruang kelas. Guru yang mengajar di SD sebanyak 735 orang guru. Guru yang berpendidikan di bawah SMA berjumlah 2 orang, SMA sederajat berjumlah 31 orang, Diploma 1

berjumlah 3 orang, Diploma 2 berjumlah 205 orang, Diploma 3 berjumlah 9 orang dan Diploma 4 berjumlah 485 orang.

Sementara itu, guru PNS Golongan II berjumlah 180 orang, Golongan III berjumlah 137 orang, Golongan IV berjumlah 265 orang dan sisanya sebanyak 153 orang adalah guru Non PNS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.5
Data Pokok SD dan MI Tahun Pelajaran 2017/2018

| No | Komponen | SD | MI | SD+MI |
|----|-------------------------|--------|-----|--------|
| 1 | Sekolah | 73 | 4 | 77 |
| 2 | Siswa Baru Tk. I | 1.682 | 67 | 1.995 |
| 3 | Siswa Seluruhnya | 10.875 | 385 | 11.464 |
| 4 | Ruang Kelas | | | |
| | a. Baik | 311 | 15 | 308 |
| | b. Rusak Ringan | 80 | 10 | 66 |
| | c. Rusak Berat | 57 | 0 | 68 |
| 5 | Kelas | 455 | 27 | 448 |
| 6 | Ruang Kelas Bukan Milik | 7 | 2 | |
| 7 | Guru | 735 | 55 | 809 |

Sumber data : Profil Pendidikan Kota Pariaman

Pada tabel tersebut tergambar pula bahwa jumlah SD lebih banyak dibandingkan dengan MI, hal ini terlihat pada semua data yang ada. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak terdapat di SD. Demikian juga dengan MI, dimana jumlah sekolah MI negeri lebih banyak daripada sekolah MI swasta. Hal ini disebabkan karena MI swasta diselenggarakan oleh yayasan swasta, dimana untuk jenjang pendidikan SD/MI peran serta swasta tidak dominan, sedangkan SD negeri lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres.

Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa jumlah siswa SD lebih banyak daripada siswa MI, begitupun dengan jumlah guru. Hal ini disebabkan karena SD ada di semua kecamatan yang ada di Kota Pariaman, sedangkan MI hanya ada di 2 (dua) kecamatan di Kota Pariaman yaitu Kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Selatan.

H. Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa jumlah SMP lebih banyak daripada jumlah MTs. SMP berjumlah 11 sekolah dan MTs berjumlah 7 sekolah. Hal ini juga berpengaruh pada jumlah siswanya. Pada tingkat SMP, siswa tingkat 1 berjumlah 1.654 orang dan MTs berjumlah 784 orang. Sedangkan siswa seluruhnya pada tingkat SMP berjumlah 4.585 orang dan 2.081 orang pada tingkat MTs. Jumlah siswa sebanyak ini harus didukung oleh kondisi ruang kelas yang memadai yang hanya terdapat 11 ruang kelas dalam kondisi rusak berat pada tingkat SMP dan 15 pada tingkat MTs, 21 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 120 dalam kondisi baik pada tingkat SMP dan 11 dalam kondisi rusak ringan, 65 dalam kondisi rusak berat pada tingkat MTs.

Tabel 5.6 Data Pokok SMP dan MTs

| No | Komponen | SMP | MTs | SMP+MTs |
|----|------------------|-------|-------|---------|
| 1 | Sekolah | 11 | 7 | 18 |
| 2 | Siswa Baru Tk. I | 1.654 | 784 | 2.438 |
| 3 | Siswa Seluruhnya | 4.585 | 2.081 | 6.666 |
| 4 | Lulusan | 1.476 | 623 | 2.099 |
| 5 | Ruang Kelas | | | |
| | a. Baik | 120 | 65 | 185 |
| | b. Rusak Ringan | 21 | 11 | 32 |
| | c. Rusak Berat | 11 | 15 | 26 |
| 6 | Kelas | 150 | 62 | 212 |
| 7 | Guru | 408 | 187 | 595 |

Sumber data : Profil Pendidikan Kota Pariaman

Pada tabel tersebut digambarkan pula bahwa jumlah kelas SMP lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kelas MTs, hal ini terlihat di semua data yang ada. Dimana terdapat 150 kelas SMP dengan jumlah guru sebanyak 408 orang guru. Sedangkan jumlah kelas MTs berjumlah 62 kelas dengan guru sebanyak 187 orang guru.

I. Tingkat Sekolah Menengah (SMA dan SMK)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2012/2013, untuk tingkat SM jumlah sekolah yang ada sebanyak 17 unit, siswa baru tingkat I sebanyak 2.693 orang siswa, jumlah siswa seluruhnya sebanyak 8.037 orang siswa dan lulusannya sebanyak 2.469 siswa. Untuk menampung jumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 246 ruang kelas, dengan rincian sebagai berikut : 192 ruangan dalam kondisi baik, 28 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan 22 ruang kelas dalam kondisi rusak berat. Guru yang mengajar di tingkat SM ada sebanyak 801 orang guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel 5.7 tentang data pokok SMA, MA dan SMK dan tabel 5.8 tentang indikator pemerataan dan perluasan pendidikan.

Tabel 5.7
Data Pokok SMA, MA dan SMK

| No | Komponen | SMA | MA | SMK | SM+MA |
|----|------------------|-------|-----|-------|-------|
| 1 | Sekolah | 7 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | Siswa Baru Tk. I | 1.431 | 59 | 1.203 | 2.693 |
| 3 | Siswa Seluruhnya | 4.184 | 503 | 3.350 | 8.037 |
| 4 | Lulusan | 1.358 | 147 | 964 | 2.469 |
| 5 | Ruang Kelas | | | | |
| | a. Baik | 90 | 15 | 87 | 192 |
| | b. Rusak Ringan | 16 | 6 | 6 | 28 |
| | c. Rusak Berat | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 6 | Kelas | 117 | 18 | 111 | 246 |
| 7 | Guru | 324 | 59 | 418 | 801 |

Sumber data : Profil Pendidikan Kota Pariaman

BAB VI

BIDANG KESEHATAN

Kesehatan merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup penduduk dan generasi penerus. Kondisi kesehatan dan status gizi merupakan elemen pokok dari mata rantai terciptanya SDM yang berkualitas. Perempuan secara kodrati memiliki fungsi reproduksi yang berbeda dengan pria, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui yang merupakan suatu proses yang sangat menentukan derajat kesehatan dirinya dan anak yang dikandungnya. Untuk itu perempuan seharusnya memiliki hak menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental.

A. Jaminan Kesehatan

Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bahwa saat ini terdapat sebuah program jaminan kesehatan secara nasional untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk. Sistem yang digunakan itu diakomodir dengan mendirikan suatu badan yang bernama Badan Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sesuai dengan namanya maka badan ini akan melaksanakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk baik miskin atau tidak miskin. Bagi penduduk miskin maka premi akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui jamkesmas dan Pemerintah Daerah melalui jamkesda.

Tabel 6.1 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Untuk Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Jaminan Kesehatan

| Karakteristik | Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan | Jaminan Kesehatan yang Digunakan untuk Berobat Jalan | | | |
|----------------------|---|--|------------------------|----------|---|
| | | BPJS Kesehatan PBI | BPJS Kesehatan Non PBI | Jamkesda | Asuransi Swasta atau Perusahaan/ Kantor |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jenis Kelamin | | | | | |
| Laki-laki | 7,34 | 19,27 | 22,51 | 19,66 | - |
| Perempuan | 9,72 | 17,81 | 21,90 | 19,90 | - |

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kesadaran untuk menggunakan jaminan kesehatan bagi penduduk di Kota Pariaman cukup rendah. Hanya sebesar 9,72 % perempuan dan 7,34 laki-laki yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Dari data di atas juga terlihat bahwa kesadaran perempuan di Kota Pariaman untuk berobat dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah pusat cukup tinggi dibandingkan laki-laki. Terdapat sebesar 21,90 % perempuan menggunakan BPJS Kesehatan Non PBI, artinya premi asuransi kesehatan yang digunakan tidak disubsidi oleh Pemerintah Pusat. Namun angka itu bergeser pada jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Jamkesda), yaitu sebesar 19,90 % dan lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 19,66 %.

B. Imunisasi Bagi Balita

Imunisasi merupakan suatu hal yang penting dilakukan bagi balita dalam rangka untuk menambah kekebalan tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit. Layanan imunisasi ini bisa didapatkan pada fasilitas kesehatan yang ada baik puskesmas atau praktek dokter. Biasanya imunisasi akan diberikan pada bayi dengan rentang usia 0-59 bulan atau yang lebih dikenal dengan Balita.

Pelayanan imunisasi di Kota Pariaman lebih banyak dinikmati oleh balita dengan jenis kelamin perempuan. Dari tabel di bawah terlihat bahwa persentase balita perempuan yang memiliki kartu imunisasi lengkap dan mendapatkan imunisasi lengkap lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 6.2. Persentase Balita Yang Memiliki Kartu Imunisasi dan Mendapatkan Imunisasi Lengkap Menurut Jenis Kelamin

| Karakteristik | Memiliki Kartu Imunisasi | Mendapat Imunisasi Lengkap |
|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Jenis Kelamin | | |
| Laki-laki | 19,58 | 29,53 |
| Perempuan | 25,67 | 47,20 |

Kemudian jika dilihat dari segi jenis imunisasi yang didapatkan tersebut, maka pada umumnya balita perempuan mendapatkan imunisasi yang lebih banyak dibandingkan dengan balita laki-laki untuk setiap jenis imunisasinya, kecuali

pada imunisasi polio yang lebih banyak dilakukan pada balita laki-laki dibandingkan dengan balita perempuan.

Tabel 6.3. Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin

| Karakteristik | Jenis Imunisasi | | | | |
|----------------------|-----------------|------|-------|--------------------|----------------|
| | BCG | DPT | Polio | Campak/ Morbili | Hepatitis B |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jenis Kelamin | | | | | |
| Laki-laki | 4,48 | 4,86 | 3,71 | 9,27 | 5,75 |
| Perempuan | 4,61 | 5,09 | 3,18 | 15,54 | 8,13 |

C. Pelayanan KB

Sebagai salah satu program nasional untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah program keluarga berencana atau KB. Program KB ini dilaksanakan juga untuk menciptakan insam manusia yang berkualitas dan mempunyai masa depan yang cerah. Program KB dapat dilaksanakan dengan 2 cara yaitu menggunakan alat kontrasepsi buatan manusia dan kontrasepsi alami.

Kesadaran perempuan untuk menggunakan KB di Kota Pariaman sudah cukup tinggi. Walaupun tingkat pendidikan rendah namun kesadaran ber-KB masih tinggi. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.4 Persentase Perempuan di Kota Pariaman Berusia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Tingkat Pendidikan dan Status Penggunaan Alat/Cara KB

| Karakteristik | Status Penggunaan Alat/Cara KB | | | Jumlah |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------|
| | Pernah Menggunakan | Sedang Menggunakan | Tidak Pernah Menggunakan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pendidikan Tertinggi | | | | |
| Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD | 96,64 | 50,18 | 29,80 | - |
| SD dan sederajat | 54,07 | 14,03 | 19,77 | - |
| SMP dan sederajat | 23,48 | 24,87 | 27,45 | - |
| SMA keatas | 25,49 | 10,94 | 7,65 | - |
| Kota Pariaman | 20,20 | 9,83 | 7,60 | - |

Program KB dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan kontrasepsi atau pun secara tradisional. Kontrasepsi yang digunakan bisa dalam jangka waktu yang panjang atau jangka waktu yang pendek sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dari tabel di bawah terlihat bahwa perempuan di Kota Pariaman lebih cenderung menggunakan alat kontrasepsi secara tradisional dibandingkan dengan menggunakan alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) atau Non MKJP. Ada suatu fakta yang unik bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan terendah lebih cenderung menggunakan MKJP dibandingkan dengan cara tradisional, dan juga perempuan dengan tingkat pendidikan Tamat SMP/sederajat lebih banyak menggunakan Non MKJP dibandingkan dengan kelompok yang lainnya.

sTabel 6.5. Persentase Perempuan di Kota Pariaman Usia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin Menurut Tingkat Pendidikan dan alat/Cara KB Modern

| Karakteristik | Alat/Cara KB Modern | | Cara Tradisional | Jumlah |
|---|---------------------|--------------|------------------|----------|
| | MKJP* | Non MKJP | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (13) |
| Pendidikan Tertinggi | | | | |
| Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Tamat SD | 74,99 | 63,10 | - | - |
| SD dan sederajat | 67,85 | 31,12 | 61,55 | - |
| SMP dan sederajat | 43,20 | 31,83 | 103,65 | - |
| SMA ke atas | 18,70 | 17,84 | 54,36 | - |
| Kota Pariaman | 16,36 | 13,90 | 53,79 | - |

*MKJP atau Metode Kontrasepsi Jangka Panjang meliputi Tubektomi/MOW, Vasektomi/MOP, IUD dan Susuk KB/Implan

BAB VII

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Aspek penting lain yang juga menjadi indikator kesejahteraan adalah ketenagakerjaan. Pada aspek ini akan tergambar bagaimana penduduk memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga mereka. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk yang telah bekerja dan penduduk yang menganggur. Banyak penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung juga menunjukkan banyaknya jumlah penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jumlah angkatan kerja Kota Pariaman pada tahun 2018 sebanyak 39.958 orang yang terdiri dari 22.570 orang laki-laki dan sebanyak 17.388 orang perempuan. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3, penduduk perempuan yang bekerja lebih sedikit daripada penduduk laki-laki bekerja, yaitu 16.147 (94,42 persen) angkatan kerja perempuan berbanding 21.156 (93,74 persen) laki-laki. Dilihat dari persentase penganggur, angkatan kerja laki-laki lebih banyak daripada angkatan kerja perempuan dengan perbandingan 6,26 persen laki-laki berbanding 5,58 persen penganggur perempuan. Angka pengangguran yang mencapai 5,97 persen dari total angkatan kerja mengindikasikan keterlibatan penduduk dalam dunia kerja belum optimal. Oleh karena itu diperlukan kebijakan untuk

memperluas kesempatan kerja agar penduduk sebagai salah satu komponen faktor produksi yang potensial lebih berdaya guna dalam kegiatan ekonomi.

Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja menghasilkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator ini menggambarkan penduduk yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Pada tahun 2018, TPAK Kota Pariaman tercatat sebesar 65,20 persen. Angka tersebut berarti, dari 100 orang penduduk usia kerja sekitar 65-66 orang diantaranya merupakan angkatan kerja, atau sekitar 65 persen dari penduduk usia kerja adalah aktif secara ekonomi. Dikelompokkan menurut jenis kelamin, TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 54,94 persen berbanding 76,15 persen. Beberapa faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah faktor umur dan pendidikan. Untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang TPAK, berikut ditampilkan tabel-tabel TPAK berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan dan jenis kelamin di Kota Pariaman.

A. Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur

Selaras dengan hipotesis tentang siklus kehidupan (life cycle) dalam ketenagakerjaan, manusia pada usia muda dan usia lanjut adalah kurang produktif. Sehingga jika digambarkan dalam bentuk grafik, TPAK menurut kelompok umur akan memperlihatkan pola U terbalik. TPAK rendah pada usia sekolah (15-19 tahun) yaitu 27,99 persen, kemudian naik sejalan dengan bertambahnya umur dan kembali turun sehingga mencapai titik terendah pada kelompok 65 tahun ke atas yaitu sebesar 23,64 persen. Puncak TPAK Kota Pariaman tahun 2017 terdapat

pada rentang usia 35-44 tahun sebesar 82,44 persen. Dengan kata lain, penduduk pada kelompok umur 35-44 tahun lah yang paling aktif secara ekonomi.

Pada semua kelompok umur, TPAK laki-laki lebih besar daripada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 25-54 tahun dengan puncak pada kelompok umur 35-44 tahun yaitu mencapai 96,82 persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 25-34 tahun sebesar 70,70 persen.

Tabel 7.1 Angkatan Kerja dan TPAK Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

| Kelompok Umur | Laki-laki | | Perempuan | | Jumlah | TPAK (persen) |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| | Jumlah | TPAK (Persen) | Jumlah | TPAK (Persen) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 15-19 | 1.605 | 30,75 | 913 | 24,18 | 2.518 | 27,99 |
| 20-24 | 2.297 | 82,83 | 1.493 | 54,63 | 3.790 | 68,83 |
| 25-34 | 4.772 | 96,52 | 4.573 | 70,70 | 9.345 | 81,89 |
| 35-44 | 6.476 | 96,82 | 4.665 | 68,35 | 11.141 | 82,44 |
| 45-54 | 4.215 | 96,48 | 2.967 | 68,21 | 7.182 | 82,37 |
| 55-64 | 2.437 | 72,42 | 2.197 | 53,94 | 4.634 | 62,30 |
| 65+ | 768 | 33,73 | 580 | 16,93 | 1.348 | 23,64 |
| Total | 22.570 | 76,15 | 17.388 | 54,94 | 39.958 | 65,20 |

B. Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam perekonomian. Artinya semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan

semakin tinggi motivasinya terjun ke pasar kerja untuk mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya.

Sebanyak 34,41 persen angkatan kerja di Kota Pariaman hanya lulusan pendidikan dasar (SLTP ke bawah) yakni sejumlah 13.750 orang, 42,77 persen berpendidikan menengah, dan sebesar 22,82 persen berpendidikan tinggi (Diploma I ke atas).

Tabel 7.2 Angkatan Kerja dan TPAK Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin

| Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Laki-laki | | Perempuan | | Jumlah | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Angkatan Kerja | TPAK (persen) | Angkatan Kerja | TPAK (persen) | Angkatan Kerja | TPAK (persen) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Tidak Punya ijazah SD | 2.939 | 75,77 | 1.644 | 33,37 | 4.583 | 52,04 |
| SD/MI/Paket A | 1.801 | 73,84 | 1.080 | 43,57 | 2.881 | 54,39 |
| SLTP Umum/ Paket B | 4.084 | 53,23 | 2.202 | 36,05 | 6.286 | 45,61 |
| SM Umum/ Paket C | 6.004 | 85,98 | 4.799 | 53,48 | 10.803 | 67,70 |
| SM Kejuruan | 4.265 | 93,33 | 2.022 | 70,50 | 6.287 | 84,53 |
| Diploma I/II/ III/ Akademi | 524 | 0,70 | 1.284 | 82,57 | 1.808 | 78,54 |
| Universitas/ D IV/S1/S2/S3 | 2.953 | 88,25 | 4.357 | 91,96 | 7.310 | 90,43 |
| Jumlah | 22.570 | 76,15 | 17.388 | 54,94 | 39.958 | 65,20 |

Dilihat dari jenis kelamin, baik TPAK laki-laki maupun perempuan tertinggi pada penduduk lulusan SMA, yakni mencapai 20,26 persen pada laki-laki dan 15,16 persen pada perempuan.

C. Pengangguran Terbuka

Penganggur dalam kajian ini didefinisikan sebagai penduduk yang sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha, dan penduduk yang tidak sedang mencari kerja atau tidak mempersiapkan usaha karena sudah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Secara sederhana analisis tentang pengangguran didekati dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perbandingan jumlah orang yang menganggur terhadap total angkatan kerja, dan Tingkat Setengah Penganggur (TSP).

Tabel 7.3 Penduduk Menganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | | | | Total | |
|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | Laki-laki | | Perempuan | | Jumlah | TPT (%) |
| | Jumlah | TPT (%) | Jumlah | TPT (%) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 15 - 19 | 364 | 22,68 | 0 | 0,00 | 364 | 14,46 |
| 20 - 24 | 493 | 21,46 | 648 | 43,40 | 1.141 | 30,11 |
| 25 - 34 | 528 | 11,06 | 97 | 2,12 | 625 | 6,69 |
| 35 - 44 | 29 | 0,45 | 98 | 2,10 | 127 | 1,14 |
| 45 - 54 | 0 | 0,00 | 128 | 4,31 | 128 | 1,78 |
| 55 - 64 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 65 + | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 1.414 | 6,26 | 971 | 5,58 | 2.385 | 5,97 |

Tabel 5.1.1 di atas menunjukkan jumlah penganggur Kota Pariaman tahun 2017 sebanyak 2.385 orang terdiri dari 1.414 orang laki-laki dan 971 orang perempuan. TPT secara keseluruhan sebesar 5,97 persen yang berarti dari 100

penduduk yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 5 hingga 6 orang pengangguran. Dibedakan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi daripada perempuan yaitu sebesar 6,26 persen dan TPT perempuan adalah sebesar 5,58 persen. Dirinci menurut kelompok umur, TPT tinggi pada penduduk usia muda, yaitu pada usia awal-awal penduduk mulai mencari pekerjaan setelah mereka menyelesaikan pendidikannya. Pada penduduk laki-laki, TPT tertinggi terdapat pada kelompok umur 15-19 tahun, sedangkan pada penduduk perempuan, TPT tertinggi terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun. TPT tertinggi Kota Pariaman sebesar 30,11 persen pada kelompok umur 20-24 tahun, angka ini berarti dari 100 orang angkatan kerja yang berusia 20-24 tahun rata-rata terdapat 30-31 orang pengangguran. TPT laki-laki tertinggi sebesar 22,68 persen pada kelompok umur 15-19 tahun sedangkan TPT perempuan tertinggi yaitu sebesar 43,40 persen, yang terjadi pada kelompok umur 20- 24 tahun. Dihubungkan dengan tingkat pendidikan, pada Tabel 5.1.2 terlihat bahwa TPT rendah pada penduduk berpendidikan dasar (SLTP ke bawah) sedangkan TPT tertinggi pada penduduk yang berpendidikan diploma. Hal ini menunjukkan masih banyak lulusan diploma yang belum bekerja.' Jumlah penganggur terbanyak adalah yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Umum yang mencapai 38,36 persen (915 orang) dari seluruh penganggur. Sedangkan penganggur yang berpendidikan SLTA ke atas berjumlah 2.328 orang (97,61%). Dengan demikian dapat dikatakan sebagian besar penganggur di Kota Pariaman merupakan pengangguran terdidik. Perbandingan jumlah penganggur berpendidikan SLTA ke atas terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok tersebut dinamakan Tingkat Pengangguran

Terdidik (TPTd). Dari penghitungan diperoleh TPTd Kota Pariaman sebesar 8,88 persen, yang berarti dari 100 orang angkatan kerja yang berpendidikan SLTA ke atas secara rata-rata terdapat 8 hingga 9 orang yang menganggur,

Tabel 7.4 Penduduk Menganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

| Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan | Laki - Laki | | Perempuan | | Total | |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Jumlah | TPT (%) | Jumlah | TPT (%) | Jumlah | TPT (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Tidak Punya Ijazah SD | 29 | 0,99 | 28 | 40,58 | 57 | 1,24 |
| SD/MI/ Paket A | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SLTP /Paket B | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SM Umum/Paket C | 774 | 12,89 | 141 | 2,94 | 915 | 8,47 |
| SM Kejuruan | 152 | 3,56 | 132 | 6,53 | 284 | 4,52 |
| Diploma I/II/III/ Akademi | 0 | 0,00 | 336 | 26,17 | 336 | 18,58 |
| Universitas /D IV/S1/ S2/S3 | 459 | 15,54 | 334 | 7,67 | 793 | 10,85 |
| Total | 1414 | 6,26 | 971 | 5,58 | 2385 | 5,97 |

BAB VIII

PEREMPUAN PADA SEKTOR PUBLIK

Negara Republik Indonesia mengatur hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian, perempuan diberikan kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berperan dalam segala bidang pembangunan. Perempuan tidak hanya harus berperan di ranah domestik, tetapi peranan perempuan di ranah publik juga telah mendapat pengakuan dan dirasa penting untuk diperjuangkan. Hal ini tampak pada partisipasi perempuan yang menjadi anggota Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif.

A. Partisipasi Perempuan di Bidang Legislatif

Keterwakilan perempuan secara proporsional di sektor publik khususnya di lembaga legislatif diharapkan akan berpengaruh terhadap program dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga ini. Hal ini mengandung arti bahwa program atau kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan karena kebijakan dan program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan pengalaman, aspirasi dan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Untuk dapat melihat bagaimana

keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kota Pariaman dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 8.1

**Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
Di Kota Pariaman Tahun 2018**

| No | Komisi | Jenis Kelamin | | |
|----|------------|------------------|------------------|-----|
| | | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | L+P |
| 1 | Komisi I | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Komisi II | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Komisi III | 6 | 0 | 6 |
| | Jumlah | 17 | 1 | 19 |

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Kota Pariaman sebesar 10 %. Meskipun demikian bila dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sudah meningkat. Akan tetapi pada sisi lain data itu juga menunjukkan bahwa masih ada 3 (tiga) Kecamatan yang belum mempunyai anggota Legislatif perempuan, yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman Timur.

Gambar 8.2

Persentase Keterwakilan Perempuan Dilembaga Legislatif Kota Pariaman



Data ini juga menunjukkan bahwa perempuan Kota Pariaman telah berpartisipasi dan berhasil menjadi anggota legislatif rata-rata 5 %. Namun bila dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki (95 %) persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari harapan. Bahkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hasil Pemilu 2019 sudah ada di bandingkan dengan hasil keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hasil Pemilu 2014. Namun memang terjadi penurunan jika dibandingkan pemilu legislatif sebelumnya. Oleh karena itu untuk mewujudkan harapan kuota keterwakilan perempuan 30% di lembaga legislatif masih memerlukan kerja keras dan perjuangan pada berbagai pihak.

Berdasarkan data tersebut dapat pula dipahami bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di

Kota Pariaman tidak mempunyai hubungan yang signifikan sistem matrilineal yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Sumatera Barat mengalami hambatan yang berasal dari dirinya sendiri dan lingkungan untuk berpartisipasi di bidang politik. Faktor hambatan dari dalam diri perempuan itu sendiri termanifestasi kurangnya rasa percaya diri sebagian besar perempuan untuk terjun dalam bidang politik. Sementara hambatan dari lingkungan terlihat dari faktor sosial budaya dan ekonomi yang tidak berbeda dengan hambatan yang ditemui oleh perempuan dari non-matrilineal lainnya untuk terlibat dalam lembaga legislatif. (Fatmariza, dkk:2006).

B. Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Eksekutif.

Keterwakilan perempuan secara proporsional di lembaga eksekutif diharapkan akan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dan dapat menghasilkan produk-produk pembangunan yang lebih sensitif gender. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dapat terakomodir, sehingga perempuan dapat menikmati hasil pembangunan dengan adil. Untuk lebih jelasnya bagaimana partisipasi perempuan di lembaga eksekutif akan dikemukakan data sebagai berikut :

Tabel 8.2

**Jumlah Camat menurut Jenis Kelamin
Di Kota Pariaman Tahun 2018**

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | L+P |
|----|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | Laki-laki (L) | Perempuan (P) | |
| 1 | Pariaman Utara | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Pariaman Tengah | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Pariaman Timur | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pariaman Selatan | 1 | 0 | 1 |
| | Jumlah | 4 | 0 | 4 |

Data yang terdapat di dalam tabel di atas menunjukkan bahwa umumnya Camat di Kota Pariaman masih didominasi oleh laki-laki.

BAB IX

KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan berperan dan bertanggung jawab untuk masa depan bangsa. Untuk mewujudkan dan menciptakan generasi yang berkualitas setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan juga diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terdapat pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Untuk merealisasikan hal tersebut maka diperlukan adanya perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Uraian berikut akan mengemukakan kondisi anak pada beberapa Kecamatan di Kota Pariaman.

A. Anak Penyandang Cacat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak penyandang cacat didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 0 – 17 tahun yang belum kawin dan mempunyai kelainan fisik

dan/atau yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak.

Kecacatan (disability) dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Kecacatan fisik akibat kecelakaan, meliputi korban peperangan, kerusuhan, kecelakaan kerja/industri, kecelakaan lalu lintas serta kecelakaan lainnya.
2. Cacat sejak lahir atau ketika dalam kandungan, golongan ini mereka yang menderita cacat akibat keturunan,
3. Cacat yang disebabkan oleh penyakit, seperti penyakit polio, penyakit kelamin, penyakit TBC, penyakit kusta, diabetes dan lain-lain.

Tabel 9.1 menunjukkan bahwa secara umum jumlah anak penyandang cacat laki-laki lebih banyak dari pada anak penyandang cacat perempuan baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Anak penyandang cacat laki-laki di perkirakan berjumlah 55 anak, anak penyandang cacat perempuan berjumlah 47 anak.

Setiap anak penyandang cacat berhak mendapatkan hak kehidupan yang layak dan fasilitas yang sama dimana pun mereka bertempat tinggal. Pernyataan ini tertuang dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang di cetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1975 di New York yang menyebutkan bahwa ”Penyandang cacat berhak untuk hidup dengan keluarga atau orang tua

angkatmereka dan berpartisipasi dalam senua kegiatan sosial, kreatif atau rekreasi”.

Tabel 9.1

**Anak Penyandang Cacat
Di Kota Pariaman Tahun 2018**

| No | Kecamatan | Anak Penyandang Cacat Mental | | | Anak Penyandang Cacat Fisik | | |
|----|------------------|------------------------------|----|-----|-----------------------------|----|-----|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | Pariaman Utara | 25 | 22 | 47 | 26 | 21 | 47 |
| 2 | Pariaman Tengah | 24 | 11 | 35 | 10 | 13 | 23 |
| 3 | Pariaman Selatan | 31 | 19 | 50 | 11 | 8 | 19 |
| 4 | Pariaman Timur | 30 | 27 | 57 | 25 | 20 | 45 |
| | Jumlah | 110 | 79 | 189 | 72 | 62 | 134 |

Untuk memenuhi hak anak penyandang cacat mendapat pendidikan yang layak, maka pada setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat telah ada sekolah luar biasa termasuk di Kota Pariaman, baik yang dikelola oleh Pemerintah atau SLB Negeri maupun SLB dikelola oleh masyarakat atau SLB Swasta sebagaimana terlihat pada tabel 9.2. Data ini menunjukkan bahwa sebagian anak cacat telah mempunyai akses terhadap pendidikan dasar maupun lanjutan.

Pemerintah Kota Pariaman sejak mencanangkan komitmen Pariaman menuju Kota Layak Anak, sangat konsen terhadap perluasan layanan pendidikan khusus, antara lain meningkatkan akses terhadap anak didik yang

memiliki keterbatasan fisik dan mental melalui pengembangan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Tabel 9.2

**Perkembangan Pendidikan Khusus
Di Kota Pariaman Tahun 2015-2018**

| NO | Kecamatan | SLB Negeri | | | | Jumlah | SLB Swasta | | | | Jumlah |
|----|------------------|------------|----|-----|-----|--------|------------|----|-----|-----|--------|
| | | TK | SD | SMP | SMA | | TK | SD | SMP | SMA | |
| 1 | Pariaman Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Pariaman Tengah | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Pariaman Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pariaman Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Peningkatan pendidik khusus menjadi sangat penting, karena menyangkut hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan per-Undang-Undangan. Demikian juga halnya pelayanan untuk mendapat pendidikan bagi anak-anak pada daerah terpencil melalui pendidikan layanan khusus, dimana anak-anak usia sekolah tidak memiliki akses atau kesempatan untuk mengikuti pendidikan konvensional (sekolah biasa). Program kegiatan pendidikan layanan khusus yang berkembang di Kota Pariaman meliputi : penyelenggaraan TK-SD Satu Atap, dan Program Kesetaraan Paket A setara SD, program Paket B setara SMP dan program Paket C setara SMA, program khusus lainnya, disamping

peningkatan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang memerlukan layanan khusus.

B. Anak Terlantar.

Dalam rangka mengidentifikasi apakah seorang anak dapat dikategorikan sebagai anak terlantar, maka digunakan kriteria keterlantaran berdasarkan variabel-variabel pokok yang berkaitan dengan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu mencakup tingkat kebutuhan akan makanan pokok, lauk pauk yang berprotein tinggi, pakaian dan kebutuhan sosial yang meliputi pendidikan dasar, tempat tetap untuk tidur, keluhan kesehatan dan keberadaan ayah kandungnya.

Anak terlantar adalah anak usia 5-17 tahun dan belum kawin dengan kriteria dan derajat keterlantaran sebagai berikut ;

1. Tidak/belum pernah sekolah dan tidak tamat sekolah pendidikan dasar (wajar 9 tahun) sesuai umur.
2. Makan makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu
3. Makan lauk pauk berprotein tinggi (nabati atau hewani) nabati < 3 kali hewani < 2 kali atau kombinasi 4-2 dalam seminggu.
4. Memiliki pakaian kurang dari 4 stel
5. Tidak mempunyai tempat tetap untuk tidur
6. Bila sakit tidak diobati
7. Yatim piatu atau bapak kandung bukan anggota rumah tangga
8. Bekerja membantu memperoleh penghasilan.

Seorang anak dikatakan tidak terlantar, jika satu kriteria terpenuhi dan dikatakan anak hampir terlantar bila dua kriteria terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang memenuhi lebih dari dua kriteria yang dikemukakan di atas.

Tabel 9.3 menunjukkan bahwa anak terlantar paling sedikit ditemukan pada Kecamatan Pariaman Utara.

Tabel 9.3

**Anak Terlantar
Di Kota Pariaman Tahun 2018**

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Total |
|----|------------------|---------------|----|-------|
| | | L | P | |
| 1 | Pariaman Utara | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Pariaman Tengah | 37 | 43 | 80 |
| 3 | Pariaman Selatan | 5 | 45 | 50 |
| 4 | Pariaman Timur | 21 | 24 | 45 |

C. Pekerja Anak

Pekerja anak yang dimaksud dalam konsep ini adalah penduduk usia 10-17 tahun yang melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan untuk kesejahteraan pribadi dan keluarga. Dan lamanya bekerja pada pekerja anak ini, paling sedikit satu jam terus menerus dalam seminggu. Termasuk dalam pengertian pekerja anak adalah anak yang bekerja membantu keluarga dalam suatu kegiatan atau usaha ekonomi tanpa upah.

Dalam perkembangan ketenagakerjaan di Kota Pariaman, pekerja anak merupakan salah satu fenomena sosial yang eksistensi dan permasalahannya masih terus berlangsung dan menjadi kompleks. Keterlibatan anak-anak dalam kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak dibebankan antara lain oleh kemiskinan yang terjadi di dalam keluarga. Secara langsung maupun tidak langsung keterlibatan pekerja anak telah memberikan kontribusi di dalam ekonomi keluarga. Namun, kondisi yang demikian justru membatasi hak-hak anak itu sendiri karena bekerja bukanlah kewajiban seorang anak.

Pada tabel 9.4 dapat diketahui bahwa pada setiap Kecamatan di Kota Pariaman ditemukan sejumlah pekerja anak. Jumlah pekerja anak laki-laki lebih banyak (77 anak) dari pada jumlah pekerja anak perempuan (58 anak).

Kecamatan Pariaman Timur ditemukan sebagai lokasi dimana pekerja anak terbanyak di Kota Pariaman, dan Kecamatan Selatan sebagai Kecamatan yang paling sedikit jumlah pekerja anaknya.

Tabel 9.4

**Jumlah Pekerja Anak (Berumur 10-17 Tahun)
Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Di Kota Pariaman Tahun 2018**

| No | Kecamatan | Jenis Kelamin | | Total |
|----|------------------|---------------|----|-------|
| | | L | P | |
| 1 | Pariaman Utara | 8 | 12 | 20 |
| 2 | Pariaman Tengah | 20 | 6 | 26 |
| 3 | Pariaman Selatan | 15 | 0 | 15 |
| 4 | Pariaman Timur | 34 | 40 | 74 |

Sumber : Dinsosnaker, 2018

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan pemahaman terhadap data terpilah yang telah dikemukakan pada uraian terdahulu yang ditulis secara sederhana, maka dapat disimpulkan beberapa ketimpangan gender yang masih ditemukan dalam pembangunan di Kota Pariaman sebagai berikut :

1. Jumlah siswa laki-laki putus sekolah lebih banyak dari pada siswa putus sekolah perempuan.
2. Perlu peningkatan dan penyadaran terhadap kondisi kesehatan ibu hamil, karena kondisi ibu hamil akan punya dampak terhadap angka kematian ibu dan bayi.
3. Besarnya jumlah pekerja migran perempuan yang perlu mendapatkan perlindungan dan bekal yang memadai untuk bekerja antar negara.
4. Keterlibatan perempuan pada sektor Publik baik pada sektor Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif masih kurang dari kuota 30%.
5. Pada setiap Kecamatan di Kota Pariaman ditemukan pekerja anak, dimana jumlah pekerja anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki.
6. Sebagai dampak bencana alam yang dialami Kota Pariaman menyebabkan bertambahnya anak berkebutuhan khusus, sehingga

memerlukan langkah-langkah pembangunan yang tepat untuk menanggulangnya.

7. Masih rendahnya kepemilikan akte lahir bagi setiap anak di Kota Pariaman terutama pada anak Panti Asuhan, anak terlantar dan anak jalanan.
8. Meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang dilakukan oleh keluarga sendiri, tetangga, sekolah dan yang lainnya.
9. Masih kurangnya keterlibatan laki-laki dalam Program Keluarga Berencana.

B. Saran dan Rekomendasi.

Dalam rangka mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, maka disarankan kepada Pemerintah Kota Pariaman hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Pariaman agar dapat menjadikan data perspektif gender ini sebagai data pembuka wawasan untuk melakukan penelitian dan analisis gender untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya ketimpangan gender dan melahirkan berbagai alternatif kebijakan dan program yang responsif gender sehingga secara bertahap kesenjangan gender dapat diatasi atau dikurangi.

2. Kepada perencana pembangunan Kota Pariaman agar dapat melakukan tindak lanjut hasil analisis menjadi dasar perencana pembangunan untuk membuat anggaran pembangunan yang responsif gender sehingga seluruh hasil pembangunan dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan.
3. Kepada pejabat setiap OPD di Kota Pariaman agar dapat meningkatkan ketersediaan data terpilah dalam setiap dan berbagai kegiatannya yang dikelolanya sesuai dengan kelompok atau bidang kerja masing-masing.